

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi sistem, dilakukan secara mudah, cepat, dan terkini dengan informasi yang didapat bisa dari manapun dan kapanpun. Kemajuan *technology* dan *information* mengambil peran penting dalam mendukung kemajuan yang berkembang secara pesat, bagaimana menciptakan teknologi yang *uptodate* (pembaruan). Teknologi komputer sangat mendukung pengolahan data untuk menciptakan sistem informasi yang memberikan hasil kerja yang maksimal. (Arief & Sugiarti, 2022).

Sistem informasi berbasis web untuk meningkatkan pelayanan publik membutuhkan analisis mendalam terkait kebutuhan dan tantangan yang ada. Selain itu, aspek keamanan dan privasi juga harus diperhatikan dalam sistem informasi berbasis web ini, agar data dan informasi yang diakses dan disimpan dalam sistem terlindungi dengan baik. (Selcha, 2024).

Sebagai lembaga publik, Dinas Pariwisata Kota Padang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Salah satu aspek penting dari *Good Governance* adalah transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu bentuk perwujudan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem informasi berbasis web, seluruh aktivitas pengelolaan arsip dapat tercatat dan dilacak, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pariwisata Kota Padang.

Arsip merupakan bukti transaksi antar pihak yang harus didokumentasikan dengan rapi, cepat dan mudah dicari pada saat dibutuhkan. Sistem pengelolaan arsip

kebanyakan masih manual, kebanyakan masih berupa *hardcopy* atau lembaran kertas. Arsip harus dijaga agar tetap utuh, tahan lama, tidak rusak sampai batas waktu yang ditentukan sebelum di hancurkan. Penyimpanan arsip butuh almari/rak penyimpanan, ruang yang bersih dan luas, tidak lembab, dijaga keamanan dari api/air atau pencurian. Kehilangan atau kerusakan arsip akan berdampak pada operasional apalagi jika arsip yang penting dan rahasia. (Arsad & Muare, 2024).

Berdasarkan penelitian terlebih dahulu dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Digital Berbasis Web untuk Mengatur Sistem Kearsipan di SMK Tri Karya" dikemukakan bahwa hasil pengamatan pada pengelolaan arsip di SMK Tri Karya meliputi pencatatan surat masuk dan surat keluar dilakukan dengan cara manual, penyimpanan dan pemeliharaan arsip yang kurang baik, tempat penyimpanan arsip yang tidak terawat dan sulit untuk pencarian arsip, sehingga perlu adanya sistem informasi untuk pengelolaan arsip. Sistem informasi arsip dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL berbasis web. Sistem informasi arsip berbasis web dapat mengelola pencatatan surat masuk, surat keluar, pencarian surat, dan penyimpanan arsip secara digital. (Sari et al., 2022).

Selanjutnya penelitian Arsad & Muare, 2024 dengan judul "Perancangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web Dengan Metode Prototype" dikemukakan bahwa pengelolaan arsip di Dinas Kehutanan Jawa Timur masih manual, kebanyakan masih berupa *hardcopy* atau lembaran kertas. Arsip harus dijaga agar tetap utuh, tahan lama, tidak rusak sampai batas waktu yang ditentukan sebelum dihancurkan. Penyimpanan arsip butuh almari/rak penyimpanan, ruang yang bersih dan luas, tidak lembab, dijaga keamanan dari api/air atau pencurian. Kehilangan atau kerusakan arsip akan berdampak pada operasional apalagi jika

arsip yang penting dan rahasia. Pada penelitian ini mengusulkan perancangan sistem pengelolaan arsip berbasis web dengan menggunakan metode prototype. Metode prototype merupakan salah satu metode pengembangan sistem atau perangkat lunak dimana versi awal perangkat lunak digunakan untuk mendemonstrasikan konsep atau rancangan yang selanjutnya dipakai untuk interaksi dengan pengguna, bila ada masalah segera dicarikan solusinya. Tujuan perancangan sistem membantu Instansi atau Lembaga agar bisa meningkatkan pengelolaan arsip menjadi lebih baik, lebih efektif dan efisien, lebih aman, penyediaan *back up* data sehingga bisa menunjang operasional atau pelayanan Instansi atau Pelayanan tersebut lebih baik lagi (Arsad & Muare, 2024).

Dan berikutnya penelitian dengan judul “Peningkatan Pengelolaan Arsip Surat Menyurat Melalui Aplikasi Berbasis Web dengan Metode Fisrt In First Out”, dikemukakan bahwa pengelolaan surat menyurat sebagai arsip di Sekretarian DPRD Kota Bandar Lampung mulai pembuatan, penerimaan, dan penyimpanan surat masih dilakukan secara manual. Agar memudahkan untuk mengarsip dan penemuan sumber informasi yang lebih efektif dan efisien dari sistem sebelumnya maka dibuat aplikasi java web dengan database MySQL, dan menggunakan metode *extreme programming* dan dibantu dengan metode penyusunan FIFO (*Fisrt In First Out*). Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi berbasis web yang memiliki fitur pencatatan arsip dan notifikasi pengarsipan surat menyurat sampai ke pencarian informasi serta pelaporan surat menyurat (Syafitri et al., 2022).

Metode *First In First Out* (FIFO) merupakan sebuah metode pengelolaan data dengan menyusun surat yang pertama kali masuk ke Aplikasi akan dikerjakan pertama kali pula dalam penanganannya. Tujuan pengembangan aplikasi berbasis web untuk arsip dengan metode FIFO diharapkan membantu bagian kesekretariatan

di Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengelolaan surat menyurat secara elektronik yang memiliki kecepatan penyajian informasi secara efektif, efisien, dan memiliki keamanan serta terjamin terekamnya informasi yang terkandung dalam lembaran arsip secara berurutan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis memiliki gagasan untuk membuat sebuah sistem informasi untuk mendukung *Good Governance* dalam mengakses informasi pengelolaan arsip, dengan mengangkat judul **“PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ARSIP BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE FIRST IN FIRST OUT (FIFO) UNTUK Mendukung Good Governance pada Dinas Pariwisata Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan beberapa masalah yang ada pada Dinas Pariwisata Kota Padang, diantaranya:

1. Bagaimana sistem pengelolaan arsip Dinas Pariwisata Kota Padang saat ini, dan apakah pengelolaan arsipnya sudah menggunakan teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi?
2. Bagaimana meminimalisir kesalahan yang terdapat dalam pencatatan pada Dinas Pariwisata Kota Padang?
3. Bagaimana rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan arsip Dinas Pariwisata Kota Padang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*?

1.3 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan terdapat dengan sementara dari penelitian ini, yaitu:

1. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk mendukung *Good Governance*, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di Dinas Pariwisata Kota Padang.
2. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk mendukung *Good Governance*, diharapkan dapat mengotomatisasi proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan pembagian arsip, sehingga mengurangi waktu dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan arsip.
3. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Berbasis Web menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) untuk mendukung *Good Governance*, diharapkan dapat membantu Dinas Pariwisata Kota Padang dalam memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

1.4 Batasan Masalah

Demi mencapai tujuan dan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang dibahas maka diperlukannya batasan masalah dari penelitian ini dengan memfokus pada pengelolaan arsip digital yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pariwisata Kota Padang dengan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO) dengan mempertimbangkan keterbatasan teknologi dan platform yang tersedia dan sistem

akan diintegrasikan dengan sistem manajemen dokumen yang sudah ada di Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan supaya suatu kegiatan mempunyai arah tertentu dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip di Dinas Pariwisata Kota Padang.
2. Dapat mengotomatisasi proses pencatatan, penyimpanan, pencarian, dan pembagian arsip, sehingga mengurangi waktu dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan arsip.
3. Dapat membantu Dinas Pariwisata Kota Padang dalam memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam suatu instansi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi:

1. Bagi Dinas Pariwisata Kota Padang
 - a. Meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip.
 - b. Mempermudah pencarian dan akses terhadap informasi.
 - c. Mendukung pelaksanaan *Good Governance*.

2. Bagi penulis

- a. Sebagai pelajaran bagi penulis dalam mengembangkan dan menambah pengetahuannya di bidang pemrograman komputer dan sistem pengolahan data, berdasarkan ilmu yang didapatkan di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
- b. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang sistem informasi. Mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi.

3. Bagi Kampus

Diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang teknologi informasi dan menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang serupa.

1.7 Tinjauan Penelitian

Tinjauan umum ini penulis akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari Dinas Pariwisata Kota Padang, yang meliputi sejarah, struktur organisasi, serta tugas dan tanggungjawab dari Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.7.1 Sejarah Dinas Pariwisata Kota Padang

Pada tahun 1983 dibentuk Satuan tugas (SATGAS) yang berguna untuk mengelola atau mengurus objek wisata Pantai Padang, baik itu untuk ketertiban, kenyamanan, keindahan, dan juga retribusi tanda masuk dan retribusi pedagang yang ada di objek wisata Pantai Padang. Pimpinan SATGAS ini juga dipercayakan kepada Bapak Al Manar yang merupakan anggota dari TNI AD. Kemudian pada tahun 1986, SATGAS ini diperluas ruang lingkup kerjanya dengan dibentuk atau dirubah menjadi Badan Pengelola Pariwisata Kota Padang, yang memiliki tugas

untuk mengelola Objek wisata Pantai Air Manis, Objek wisata Pantai Pasir Jambak. Badan Pengelola Pariwisata Kota Padang ini dipimpin oleh Drs. Dasril Ramli. Dengan seiring pesatnya kemajuan Kota Padang pada tahun 1988, pada sector pariwisatanya berubah lagi menjadi cabang Dinas Provinsi yang dikepalai oleh Drs. Bachtar Bahar. Lalu pada tahun 1990 ada penyerahan urusan di Bidang sector kepariwisataan dari provinsi kepada Kabupaten/ Kota, dengan hal ini dibentuklah Dinas Pariwisata Kota Padang yang dikepalai oleh Arman Rahman S.H.

Kemudian pada tahun 1994–1995 Dinas Pariwisata berganti lagi pimpinannya yang mana dipimpin oleh Dhermawan Ilyas B.A. Pada tahun 1996 terjadi lagi pergantian pimpinannya yaitu Drs. Helmi Zaini sampai tahun 1998. Pada awal tahun 1999 terjadi lagi pergantian pimpinan dari Drs. Helmi Zaini kepada Ir. Indra Chatri, M.TP. Pada tahun 2000, Dinas Pariwisata mendapat tanggung jawab yang besar untuk mengurus dan mengelola kebudayaan tradisional yang ada di Padang, dengan hal ini Dinas Pariwisata Kota Padang berganti naman menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang.

Pada tahun 2001, terjadi pergantian pimpinan kepada Ir. Mudrika, dengan masa jabatannya sampai tahun 2004. Di tahun 2005, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berganti lagi pimpinannya oleh Ir. Harmensyah MM. Pada tahun 2006, dikarenakan ada mutasi pejabat Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintahan Kota Padang. Salah seorang pejabat tersebut menjadi kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bernama Ir. Erizon M.P. Pada tahun 2007, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terjadi lagi pergantian pimpinan kepada Drs. Didi Aryadi, M.Si dengan masa jabatan sampai dengan pertengahan 2009.

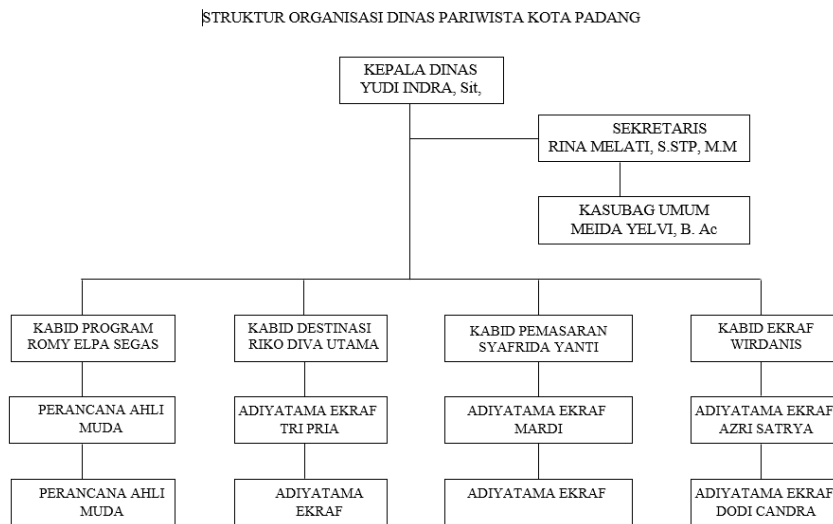
Pada pertengahan 2009, kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berganti lagi menjadi Drs. Edi Hasymi, M.Si. sampai pertengahan 2012. Rentang waktu

pertengahan waktu 2012 Drs. Edi Hasymi, M.Si. digantikan oleh Ir. Arnel M.Si dengan masa jabatan + 3 bulan. Kemudian digantikan oleh Ali Basar S.H., MM. sampai akhir tahun 2012. Diawal tahun 2013, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin Drs. Deno Indra Firmansyah, MM. dengan masa tugas sampai pertengahan tahun 2014. Pada pertengahan 2014, Ir. Dian Fakri, MSP. dipercayakan untuk menjadi pimpinan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai bulan Oktober tahun 2015. Setelah itu berganti lagi pimpinannya yaitu Medi Iswandi, ST., MT. dengan terbitnya Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berganti nama menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

Dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru ini Medi Iswandi, ST., MT. menduduki jabatan kepala dinas sampai tanggal 6 Februari 2019. Pada bulan maret 2019 terjadi kekosongan pimpinan, Drs. Didi Aryadi dipercayakan sebagai PLT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang sampai tanggal 5 Juni 2019. Pada tanggal 11 Juni 2019 dilantik Drs. Arfian secara definitif oleh Walikota Padang sebagai kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Pada awal Januari 2021, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang berganti nama menjadi Dinas Pariwisata berdasarkan Peraturan Walikota Padang Padang Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata. Pada tanggal 1 Oktober 2021 dilantik Raju Minropa, S.STP, M.Si. yang mana menjabat sebagai PLT Kadis Pariwisata sampai tanggal 1 Maret 2022. Setelah itu dilantik Eri Sendjaya S,Sos, M.Si oleh Walikota Padang sebagai definitif sampai 22 Mei 2023.dan kembali lagi pergantian Pimpinan yang dikepalai oleh Yudi Indra Syani,S.Sit,MT sampai saat sekarang ini.

1.7.2 Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, struktur organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Padang

1.7.3 Tugas dan tanggung jawab

Berdasarkan Gambar 1. 1 dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian diantaranya sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Mereka memimpin sebuah lembaga pemerintah yang bertugas untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan memberikan pelayanan terkait dengan pariwisata, tugasnya yaitu:

- a. Memajukan sektor pariwisata, seperti pengembangan destinasi wisata baru, promosi wisata, dan peningkatan kualitas pelayanan.
- b. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada pelaku usaha pariwisata, seperti hotel, restoran, dan agen perjalanan.

- c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pariwisata, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

2. Sekretaris

Seorang pejabat yang memiliki peran penting dalam mendukung kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara garis besar, sekretaris dinas ini berperan sebagai berikut:

- a. Menjadi penghubung antara kepala dinas dengan bagian-bagian lain di dinas, serta dengan instansi terkait di luar dinas.
- b. Dapat ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh kepala dinas.
- c. Membantu kepala dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di dinas.

3. Kasubag Umum

Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi umum di dinas tersebut, tugasnya yaitu:

- a. Mengurus segala hal yang berkaitan dengan pegawai, mulai dari rekrutmen, pengembangan karir, hingga pensiun.
- b. Mengelola dan memelihara aset-aset dinas, seperti gedung, kendaraan, dan peralatan kantor.
- c. Mengurus surat-menyurat, arsip, dan administrasi lainnya.
- d. Membantu dalam pengelolaan anggaran dan keuangan dinas.

4. Kabid Program Dinas Pariwisata

Seorang pejabat yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Kota Padang, tugasnya yaitu:

- a. Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan
- b. Membuat anggaran untuk pelaksanaan program-program pariwisata.

5. Kabid Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata

Orang yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan tempat-tempat wisata dan daya tarik yang ada di Kota Padang, tugasnya yaitu:

- a. Mengelola dan mengembangkan destinasi wisata Ini termasuk mencari lokasi-lokasi baru yang potensial untuk dijadikan tempat wisata, merencanakan pembangunan fasilitas wisata, dan memastikan tempat-tempat wisata yang sudah ada tetap terawat dan menarik.
- b. Mempromosikan daya tarik wisata Kota Padang Beliau bertanggung jawab untuk membuat Kota Padang semakin dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti membuat kampanye promosi, bekerja sama dengan pelaku industri pariwisata, atau mengikuti pameran pariwisata.
- c. Menerapkan kebijakan pariwisata Beliau membantu membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kota Padang.

6. Kabid Pemasaran

Seorang pejabat struktural yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata di Kota Padang adalah orang yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan memasarkan potensi wisata Kota Padang agar menarik lebih banyak wisatawan, tugasnya yaitu:

- a. Merancang rencana yang efektif untuk mempromosikan destinasi wisata Kota Padang.

- b. Mengorganisir berbagai kegiatan promosi, seperti pameran, festival, dan kampanye digital.
- c. Menganalisis hasil kegiatan promosi dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

7. Kabid Ekonomi Kreatif

Seorang pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Padang. Sektor ini mencakup berbagai bidang seperti seni, desain, kuliner, fesyen, film, musik, dan lain-lain, tugasnya yaitu:

- a. Membuat dan mengembangkan kebijakan terkait pengembangan ekonomi kreatif di Kota Padang.
- b. Menerapkan kebijakan yang telah dibuat, seperti program pelatihan, pendanaan, dan promosi bagi pelaku ekonomi kreatif.
- c. Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, pelaku industri kreatif, dan lembaga pendidikan
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif melalui pelatihan dan workshop.

8. Perencana Ahli Muda

Seorang profesional yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata di Kota Padang. Mereka memiliki keahlian khusus dalam bidang perencanaan, analisis, dan evaluasi, tugasnya yaitu:

- a. Menyusun rencana strategis pengembangan pariwisata Kota Padang.
- b. Menganalisis pasar wisata dan tren pariwisata terkini.

9. Adiyatama Kepariwisata dan Ekraf

Seorang jabatan fungsional yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus dalam memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di suatu daerah, termasuk di Kota Padang, tugasnya yaitu:

- a. Mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan.
- b. Menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
- c. Bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah daerah.